



**TAHUNAN
2023
(Audited)**



CaLK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kelurahan Alak
Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT 85231
Telp. (0380) 890 456 Email: psdkp.kupang@kcp.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemangku kepentingan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Kupang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kupang, 13 Mei 2024
Kepala Stasiun PSDKP Kupang


Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
NIP. 198403092008011003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab.....	4
Ringkasan.....	5
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	8
II. Neraca.....	9
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum.....	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	45
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	60
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	71
G. Lampiran dan Daftar.....	76

STASIUN PSDKP KUPANG
JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, ALAK,
KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TELEPON/FAXIMILE 0380-890456

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kupang, 13 Mei 2024
Kepala Stasiun PSDKP Kupang,


Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi
NIP. 198403092008011003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp70,014,382. Penjelasan lengkap terdapat pada bab penjelasan pos-pos di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagian Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,404,401,127 atau mencapai 99,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp27,468,440,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp13,237,524,814 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp644,673,809; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap sebesar Rp12,592,851,005 yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan, serta akumulasi penyusutan; Aset Lainnya sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp14,032,807 dan Rp13,223,492,007.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21,125,383, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp28,018,279,294 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(27,997,153,911). Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(76,472,685), dan Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(28,073,626,596) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(28,073,626,596).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp14,078,319,416 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(28,073,626,596), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp(120,906,308), dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27,339,705,495 serta penurunan Ekuitas sebesar Rp(854,827,409) sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp13,223,492,007.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN PSDKP KUPANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER
2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% thd Angg	31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,000,000	70,014,382	388.97	21,113,681
JUMLAH PENDAPATAN		18,000,000	70,014,382	388.97	21,113,681
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	6,125,796,000	6,124,706,779	99.98	5,366,945,517
Belanja Barang	B.4	19,972,545,000	19,910,453,618	99.69	13,096,205,826
Belanja Modal	B.5	1,370,099,000	1,369,240,730	99.94	3,495,382,140
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		
JUMLAH BELANJA		27,468,440,000	27,404,401,127	99.77	21,958,533,483

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**STASIUN PSDKP KUPANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	1,850,000	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(9,250)	-
Uang muka belanja (prepayment)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	642,833,059	695,812,272
Jumlah Aset Lancar		644,673,809	695,812,272
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	313,440,825	291,852,200
Peralatan dan Mesin	C.15	29,832,032,976	29,574,600,336
Gedung dan Bangunan	C.16	7,236,950,407	6,328,437,971
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	1,942,265,392	1,746,823,363
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	98,390,000	98,390,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.18	(26,830,228,595)	(24,786,064,985)
Jumlah Aset Tetap		12,592,851,005	13,254,038,885
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	114,654,470	921,299,970
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.23	(114,654,470)	(776,652,275)
Jumlah Aset Lainnya		-	144,647,695
JUMLAH ASET		13,237,524,814	14,094,498,852
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	14,032,807	16,179,436
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14,032,807	16,179,436
JUMLAH KEWAJIBAN		14,032,807	16,179,436
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	13,223,492,007	14,078,319,416
JUMLAH EKUITAS		13,223,492,007	14,078,319,416
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13,237,524,814	14,094,498,852

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PSDKP KUPANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	21,125,383	13,478,538
JUMLAH PENDAPATAN		21,125,383	13,478,538
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,122,856,779	5,317,450,320
Beban Persediaan	D.3	234,309,153	216,114,810
Beban Barang dan Jasa	D.4	14,190,921,723	9,149,735,639
Beban Pemeliharaan	D.5	3,271,057,013	2,443,974,843
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,264,998,313	1,434,526,470
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,934,127,063	2,381,213,487
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	9,250	-
JUMLAH BEBAN		28,018,279,294	20,943,015,569
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27,997,153,911)	(20,929,537,031)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	4,289,173
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(76,472,685)	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	256
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(76,472,685)	4,289,429
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(28,073,626,596)	(20,925,247,602)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(28,073,626,596)	(20,925,247,602)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	E.1	14,078,319,416	12,735,312,976
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(28,073,626,596)	(20,925,247,602)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	(120,906,308)	(4,235,760)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(120,906,308)	(4,235,760)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		(28,194,532,904)	(20,929,483,362)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	27,339,705,495	22,272,489,802
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(854,827,409)	1,343,006,440
EKUITAS AKHIR	E.5	13,223,492,007	14,078,319,416

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

Visi KKP adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan

pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi KKP

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal PSDKP yaitu “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi KKP 2020-2024 maka ditetapkan Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Stasiun PSDKP Kupang merupakan salah satu UPT PSDKP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan memiliki wilayah Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTT. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang (sebelumnya Satuan Kerja PSDKP Kupang) terletak di Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Stasiun PSDKP Kupang dipimpin oleh Kepala Stasiun yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. Kepala Stasiun membawahi Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana, Pelaksana Koordinasi

Urusan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Stasiun PSDKP Kupang serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, maka dirumuskan Visi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

“Perairan Lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang Bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”

Sejalan dengan visi Stasiun PSDKP Kupang, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 2) Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkup UPT Stasiun PSDKP Kupang*

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Dalam perspektif BSC Stasiun PSDKP

Kupang telah menetapkan 10 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾ Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾ Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁷⁾ Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan; ⁽⁸⁾ Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁹⁾ Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas; ⁽¹⁰⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT Stasiun PSDKP Kupang didukung oleh sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang diperlukan. SDM Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari pegawai PNS dan PPNNP sebanyak 75 orang yang tersebar di UPT, Satwas, dan Wilker dengan perincian:

- Stasiun PSDKP Kupang dan Pos Atapupu sebanyak 24 PNS, 5 PPPK, 7 PPNNP, dan 10 PJLP;
- Satwas SDKP Flores Timur sebanyak 4 PNS dan 1 PPNNP;
- Wilker PSDKP Maumere sebanyak 4 PNS;
- Satwas Sumba Timur sebanyak 2 PNS dan 1 PPNNP;
- Kapal Pengawas Hiu Macan 03 sebanyak 12 PNS, 1 PPNNP, dan 4 PPPK;

Sementara itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki

antara lain: Gedung Kantor, Rumah Dinas, Mess Stasiun PSDKP Kupang, Gedung Kantor Satwas Flores Timur, Gedung Kantor Satwas PSDKP Sumba Timur, Gedung Kantor Pos PSDKP Atapupu, Kapal Pengawas Hiu Macan 03, Speedboat Napoleon 054, Speedboat Hiu Biru 04 dan Rubberboat.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang meliputi seluruh wilayah provinsi NTT, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Stasiun PSDKP Kupang dibantu oleh dua Satwas SDKP, yaitu Flores Timur dan Sumba Timur, serta dua Wilker yaitu Atapupu dan Maumere.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang didirikan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang merupakan pendukung implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kupang diharapkan laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Pengawasan SDKP Kupang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Kupang. Disamping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Pencatatan Nilai Persediaan mengakomodir penggunaan metode FIFO sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Kebijakan Akuntansi persediaan yang diambil oleh KKP berdasarkan hasil keputusan *tripartite* yaitu :
 1. Persediaan Suku Cadang Kapal

Suku cadang kapal sesuai karakteristiknya tetap dicatat sebagai persediaan;

KKP perlu membuat kartu kendali persediaan suku cadang serta melakukan stok opname fisik pada akhir periode baik yang ada di gudang maupun yang ada di kapal.
 2. Persediaan BBM Kapal

Pencatatan persediaan BBM Kapal dikeluarkan dari Neraca namun perlu diungkap dalam CaLK KKP;

BBM yang berada di kapal diperlakukan sebagai beban persediaan pada saat BBM diisi ke tangki kapal;

Mengutip pernyataan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tingkat akurasi hasil stok opname fisik BBM di kapal tergantung pada posisi dan kondisi kapal;

Cost untuk menghitung persediaan BBM Kapal lebih besar dibandingkan benefit dari pencatatan BBM Kapal, karena secara substansi KKP tidak memiliki gudang penyimpanan BBM kapal;

KKP perlu membuat aturan terkait mekanisme pengendalian penggunaan BBM oleh Kapal, untuk mencegah penyalahgunaan BBM Kapal sebagai laporan manajerial;

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan

untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

Panjang

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya***e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2023, Stasiun PSDKP Kupang telah melaksanakan 19 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *Automatic Adjustment*, membuka blokir anggaran pengadaan bangunan Kantor Wilker Maumere, penambahan anggaran belanja pegawai untuk PPPK di UPT, pemutakhiran data revisi POK, mengupdate halaman III DIPA, pergeseran anggaran yang diblokir ke pusat, serta revisi untuk pemenuhan kegiatan operasional kantor. Pagu awal sebesar Rp26,389,267,000 setelah revisi menjadi sebesar Rp27,468,440,000.

Berikut penjelasan atas detail revisi yang telah dilaksanakan sampai akhir tahun 2023:

- a. Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022. Revisi ini untuk menyediakan anggaran cadangan atau *Automatic Adjustment* dengan cara memblokir Sebagian anggaran yang dimiliki UPT;
- b. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- c. Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023. Revisi ini untuk membuka blokir anggaran pembangunan kantor Wilker PSDKP Maumere;
- d. Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- e. Revisi kelima dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;

- f. Revisi keenam dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- g. Revisi ketujuh dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- h. Revisi kedelapan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- i. Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- j. Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- k. Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023. Revisi ini adalah revisi Kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran untuk pemenuhan kekurangan anggaran biaya sertifikat tanah dan menggeser anggaran yang diblokir AA dari UPT ke Sesdit;
- l. Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Revisi ini adalah revisi Dit PA untuk pemenuhan kekurangan anggaran Belanja Pegawai (PPPK);
- m. Revisi ketiga belas dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- n. Revisi keempat belas dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Revisi ini adalah revisi Kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran yang diblokir kode 2 (anggaran sewa kendaraan yang diblokir) ke pusat;
- o. Revisi kelima belas dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran yang diblokir ABT

- (kode 9) ke pusat;
- p. Revisi keenam belas dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran yang diblokir kode 2 (anggaran pokmaswas) ke pusat;
- q. Revisi ketujuh belas dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023. Revisi ini merupakan kewenangan kanwil berupa pergeseran antar jenis belanja untuk mengakomodir kekurangan anggaran pada kegiatan kantor;
- r. Revisi kedelapan belas dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan Dit PA berupa pergeseran anggaran dari Kupang ke Satker lain;
- s. Revisi kesembilan belas dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023. Revisi ini adalah kewenangan kanwil berupa pergeseran belanja pegawai untuk penyelesaian pagu minus.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,000,000	18,000,000
Jumlah Pendapatan	18,000,000	18,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	5,986,361,000	6,125,796,000
Belanja Barang	19,003,889,000	19,972,545,000
Belanja Modal	1,399,017,000	1,370,099,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	26,389,267,000	27,468,440,000

Revisi di atas antara lain berupa blokir AA (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp1.200.696.000, buka blokir anggaran pembangunan Kantor Wilker Maumere sebesar Rp912.103.000, pergeseran anggaran yang diblokir AA dari UPT ke Sesdit sebesar Rp762.807.000, penambahan belanja pegawai sebesar Rp185.435.000, pergeseran

anggaran yang diblokir ke pusat Rp934.197.000, pergeseran anggaran ke UPT lain sebesar Rp15.000.000, serta pemutakhiran atas revisi-revisi POK.

*Realisasi
Pendapatan
Rp70,014,382*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Stasiun PSDKP Kupang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70,014,382. Rincian pendapatan Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18,000,000	70,014,382	0.26
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	48,888,999	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	6,739,272	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	352,148	-
Pendapatan Denda Lainnya	18,000,000	14,033,963	1.28
Jumlah	18,000,000	70,014,382	0.26

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 sebesar Rp70,014,382. Dari perbandingan antara 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2023, terdapat peningkatan nilai penerimaan. Penerimaan pada 31 Desember 2023 tersebut berasal dari:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket Bongkaran Hasil Perbaikan Kapal Hiu Macan 03 (terdiri dari 1 paket bongkaran replating KP Hiu Macan 03 dan 2 unit genset KP Hiu Macan 03) senilai **Rp40,000,000** dengan Nomor Risalah 1306/37/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dan

- 1 Paket Peralatan dan Mesin (Motor Tempel Speedboat, Perahu Karet, Alat Pengolah Air Laut) dan 1 unit Sepeda Motor senilai **Rp8,888,999** dengan Nomor Risalah Lelang: 221/69/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar **Rp6,739,272** yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.012/KPA-PSDKPSta.3/I/2023 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang;
- c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan listrik darat senilai **Rp352,148** dengan NTPN DD31F0N9VRFE1B40 dan tanggal bayar 24 Agustus 2023;
- d. Pendapatan Denda Lainnya sebesar **Rp14,033,963** yang berasal dari pendapatan fungsional (sanksi administrasi pada pelaku usaha yang tidak tertib) dan dibayarkan dengan penyeteroran langsung ke negara dengan NTPN 964AF7QLUFMB7T0U pada tanggal 15 April 2023.

Sedangkan pada 31 Desember 2022 berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang dengan biaya sewa sebesar Rp13,478,538. Selain itu juga

terdapat Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp256 yang berasal dari pengembalian pembulatan pembayaran kekurangan belanja pegawai pada tahun sebelumnya. Dan terdapat lelang rangka bangunan sisa pekerjaan renovasi kantor sebesar Rp5,288,888, serta lelang peralatan dan mesin yang sudah rusak berat sebesar Rp2,345,999.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	70,014,382	21,113,681	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272	13,478,538	-
Pendapatan Denda Lainnya	14,033,963	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	256	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	48,888,999	2,345,999	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	5,288,888	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	352,148	-	-
Jumlah	70,014,382	21,113,681	-

Rincian Pendapatan Sampai Akhir Tahun 2023

URAIAN PENDAPATAN	Nominal
Penerimaan Negara Bukan Pajak	70,014,382
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272
Pendapatan Denda Lainnya	14,033,963
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	48,888,999
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	352,148

Realisasi

*Belanja Negara
Rp27,404,401,127*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27,404,401,127 atau 99,77% dari anggaran belanja sebesar Rp27,468,440,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	6,125,796,000	6,124,706,779	99.98
Belanja Barang	19,972,545,000	19,910,453,618	99.69
Belanja Modal	1,370,099,000	1,369,240,730	99.94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	27,468,440,000	27,404,401,127	99.77

Dibandingkan dengan 31 Desember TA 2022, Realisasi Belanja 31 Desember TA 2023 secara keseluruhan lebih rendah dalam nominal maupun persentase realisasi. Penjelasan untuk hal ini adalah:

1. Untuk belanja pegawai, terdapat kenaikan realisasi anggaran yang juga diimbangi naiknya pagu anggaran daripada tahun lalu karena adanya kenaikan gaji berkala pegawai, dan kenaikan gaji berdasarkan PP terbaru mengenai gaji PNS, pelantikan PPPK sebanyak 8 orang. Jumlah PNS Stasiun PSDKP Kupang saat ini sebanyak 46 orang (37 orang golongan III, dan 9 orang golongan II), dan 9 orang PPPK (5 orang golongan IX, 1 orang golongan VII, dan 3 orang golongan V).
2. Untuk belanja barang terjadi peningkatan nominal realisasi dibandingkan pada tahun 2022 disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas serta kenaikan harga BBM Kapal Pengawas di tahun 2023.
3. Untuk belanja modal mengalami penurunan realisasi anggaran. Menurunnya nilai realisasi anggaran disebabkan karena menurunnya juga alokasi anggaran belanja modal. Pada tahun 2022 terdapat alokasi belanja modal yang cukup besar yaitu untuk pembangunan speedboat senilai Rp2.972.924.000 dan pengadaan kendaraan senilai Rp462.500.000 sedangkan pada tahun 2023 belanja modal berupa pembangunan kantor Wilker di Maumere senilai Rp930.103.000.

*Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,124,706,779	5,366,945,517	14.12
Belanja Barang	19,910,453,618	13,096,205,826	52.03
Belanja Modal	1,369,240,730	3,495,382,140	(60.83)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	27,404,401,127	21,958,533,483	24.80

*Belanja
Pegawai
Rp6,124,706,779*

B.3 Belanja Pegawai

3.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,124,706,779 dan Rp5,366,945,517. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2023 sebesar Rp6,124,706,779 (sebesar 99,98%), sementara pada 31 Desember TA 2022 sebesar Rp5,366,945,517 (sebesar 99,93%). Hal ini disebabkan:

1. Untuk belanja pegawai 2023 terdapat kenaikan realisasi anggaran yang juga diimbangi naiknya pagu anggaran daripada tahun lalu karena adanya kenaikan gaji berkala pegawai, dan kenaikan gaji berdasarkan PP terbaru mengenai gaji PNS, pelantikan PPPK sebanyak 8 orang.
2. Pada tahun 2022 terdapat penambahan 1 pegawai dari Pemda Sikka, perubahan status pegawai dari

CPNS ke PNS, kenaikan gaji berkala pegawai, dan kenaikan gaji berdasarkan PP terbaru mengenai gaji PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,927,326,925	2,694,829,117	8.63
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	158,133,920	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	240,530,000	198,836,000	20.97
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	2,799,390,826	2,475,125,859	13.10
Jumlah Belanja Kotor	6,125,381,671	5,368,790,976	14.09
Pengembalian Belanja Pegawai	(674,892)	(1,845,459)	(63.43)
Jumlah Belanja	6,124,706,779	5,366,945,517	14.12

Pada realisasi tahun 2023 terdapat pengembalian yang berasal dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp192, dan pengembalian gaji atas kelebihan bayar sebesar Rp674,700, sedangkan pada tahun 2022 terdapat pengembalian yang berasal dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp459 dan pengembalian atas kesalahan akun pembayaran sebesar Rp180,000, serta Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Rp1,665,000.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp19,910,453,618

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19,910,453,618 dan Rp13,096,205,826. Realisasi Belanja Barang TA 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini karena pada tahun ini terdapat penambahan hari operasi Kapal Pengawas di 2023 serta kenaikan harga BBM Kapal Pengawas. Pada tahun 2023 terdapat pengembalian sebesar Rp999 yang merupakan pengembalian atas kelebihan bayar perjalanan dinas pegawai. Pengembalian telah disetor sesuai pada NTPN 8F8BB2CPNJCLR0MK yang dibayarkan pada tanggal 17 November 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1,367,988,575	1,301,762,358	5.09
Belanja Barang Non Operasional	12,321,321,746	7,427,952,993	65.88
Belanja Jasa	503,758,031	411,175,387	22.52
Belanja Pemeliharaan	3,248,869,249	2,373,906,253	36.86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,264,999,312	1,435,126,470	57.83
Belanja Barang Persediaan	203,517,704	146,282,815	39.13
Jumlah Belanja Kotor	19,910,454,617	13,096,206,276	52.03
Pengembalian Belanja	(999)	(450)	-
Jumlah Belanja	19,910,453,618	13,096,205,826	52.03

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp1,369,240,730

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,369,240,730 dan Rp3,495,382,140. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 lebih rendah dibandingkan dengan 2022 disebabkan karena menurunnya juga alokasi anggaran belanja modal. Pada

tahun 2022 terdapat alokasi belanja modal yang cukup besar yaitu untuk pembangunan speedboat senilai Rp2.972.924.000 dan pengadaan kendaraan senilai Rp462.500.000 sedangkan pada tahun 2023 belanja modal berupa pembangunan kantor Wilker di Maumere senilai Rp930.103.000.

Belanja modal tanah pada tahun 2023 tidak ada karena bangunan kantor Stasiun PSDKP Kupang berdiri di atas tanah milik BKKPN Kupang (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun ini tidak ada karena sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	21,588,625	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243,697,640	3,495,382,140	(93.03)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	908,512,436	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	195,442,029	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,369,240,730	3,495,382,140	(60.83)
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	1,369,240,730	3,495,382,140	(60.83)

*Belanja Modal
Tanah
Rp21,588,625*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21,588,625 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sama dengan TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat proses pembuatan sertifikat tanah di Sumba Timur dan Maumere sedangkan 2022 tidak ada belanja modal tanah karena aset gedung dan bangunan Stasiun PSDKP Kupang sebagian besar berdiri di atas tanah dengan

status pinjam pakai dan untuk Satwas Flores Timur merupakan tanah hibah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	21,588,625	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	21,588,625	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja	21,588,625	0	0.00

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp243,697,640*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp243,697,640 dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3,495,382,140. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun 2022 yang terdapat pekerjaan pengadaan speedboat dan pengadaan kendaraan roda 4.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Pengolah Data	95,522,300	37,629,000	153.85
Kendaraan Roda 4	0	462,500,000	(100.00)
Fasilitas Perkantoran	78,381,090	34,575,390	126.70
Pengadaan Perlengkapan Speedboat	19,941,150	0	#DIV/0!
Perlengkapan Kapal Pengawas	19,991,100	43,300,000	(53.83)
Speedboat Pengawas	0	2,917,377,750	(100.00)
Alat Selam dan Camera Under water	0	0	#DIV/0!
Mic Meja Rapat	0	0	#DIV/0!
Kamera Udara (Drone)	0	0	#DIV/0!
PC untuk Pelayanan Publik	29,862,000	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	243,697,640	3,495,382,140	(93.03)
Pengembalian	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	243,697,640	3,495,382,140	(93.03)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp908,512,436

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp908,512,436 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih tinggi dikarenakan pada TA 2023 terdapat alokasi anggaran untuk belanja modal Gedung dan bangunan berupa pembangunan kantor Wilker PSDKP Maumere, sementara pada tahun 2022 tidak terdapat alokasi anggaran belanja gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan bangunan	908,512,436	0	#DIV/0!
Perencanaan Teknis Pembangu	97,147,200	0	#DIV/0!
Pembangunan Konstruksi Pos P	692,575,900	0	#DIV/0!
Pengawasan Konstruksi Pos Pe	59,564,820	0	#DIV/0!
Pengelolaan Kegiatan Pembang	59,224,516	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	908,512,436	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	908,512,436	0	#DIV/0!

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp195,442,029

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp195,442,029 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal JIJ TA 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 terdapat anggaran pembangunan listrik darat kapal pengawas dan sudah terealisasi sedangkan TA 2022 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Perbandingan Realisasi
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	195,442,029	0
Konstruksi	195,442,029	0
Perencanaan dan Pengawasan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	195,442,029	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	195,442,029	0

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Bulan Desember TA 2023 dan Desember TA 2022*

Keterangan	DESEMBER TH 2023	TH 2022
Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	-	-
Bank BRI No. Acc 0039-01-003058-30-4 (BP)	-	-
Bank BRI No. Acc 0246-01-001037-30-9 (BPP Flotim)	-	-
Bank BRI No. Acc 0141-01-001102-30-0 (BPP Sumtim)	-	-
Jumlah	-	-

Untuk saldo kas di rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 berupa saldo kuitansi UP yang belum diSPJkan. Sementara saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. PNBPN yang telah diterima oleh Stasiun PSDKP Kupang sudah disetorkan ke negara.

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang PNBPN
Rp1,850,000*

C.4 Piutang PNBPN

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1,850,000 dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat kelebihan bayar pada Tunjangan Umum pegawai yang sedang tugas belajar

sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE sebesar Rp1.850.000.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Rp0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Rp0 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar**

Rp(9,250) Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(9,250) dan Rp0. Penyisihan pada tahun 2023 merupakan penyisihan dari pengembalian atas kelebihan bayar belanja pegawai TA 2023 (Temuan Pemeriksaan BPK).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Uang Muka
Belanja
(prepayment)
Rp0*

C.9 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Uang muka belanja (*prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pada akhir periode September 2023 tidak terdapat uang muka belanja (*prepayment*).

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.10 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan
Rp642,833,059*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp642,833,059 dan Rp695,812,272.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan**31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	32,843,351	63,634,800
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	609,989,708	632,177,472
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Jumlah	642,833,059	695,812,272

Barang konsumsi untuk persediaan yang masih ada pada tanggal pelaporan antara lain alat tulis kantor, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, Cutter, Alat Perekat, Staples, Isi Staples, Barang Cetak, ATK Lainnya, Kertas HVS, berbagai kertas, amplop, kertas dan cover lainnya, pita printer, tinta/toner printer, USB/Flashdisk, mouse, dan bahan komputer lainnya. Sementara, suku cadang yang tersedia terdiri dari Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor sebesar Rp417,469,192, Suku Cadang Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebesar Rp192,520,516, Suku Cadang Alat Besar Apung sebesar Rp0 yang tercantum pada Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Kapal Pengawas Nomor: No : 210/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Napoleon 054 Nomor: 300/NPL.054-STA.3/PL.430/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Speedboat Hiu Biru 04 Nomor: 269/HB.04-STA.3/PL.430/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, dan Berita Acara Pemakaian Suku Cadang Rubberboat Nomor: 012/RB-Sta.3-FLT/KW.310/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023. Mutasi

nilai persediaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Transaksi	Nilai
SALDO AWAL PADA 1 JANUARI 2023	695,812,272
MUTASI TAMBAH	
Total Pembelian (pada aplikasi persediaan)	644,793,862
Reklas Masuk	100,000
Pendapatan Persediaan (pada LO)	-
Total Mutasi Tambah	644,893,862
MUTASI KURANG	
Beban Persediaan (pada LO)	234,309,153
Beban Persediaan Suku Cadang	463,463,922
Reklas Masuk	100,000
Total Mutasi Kurang	697,873,075
SALDO AKHIR PADA 31 Desember 2023	642,833,059

Rincian persediaan lengkap dapat dilihat pada laporan stok persediaan pada laporan SIMAK BMN. Semua barang persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

No	Debitur	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1		-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp313,440,825*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Kupang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp313,440,825 dan Rp291,852,200. Nilai aset tetap Tanah Stasiun PSDKP Kupang berasal dari hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk Kantor Satwas PSDKP Flores Timur, yang sudah diserahterimakan sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 terdapat penambahan aset tanah Stasiun PSDKP Kupang yaitu dari Pemda Sikka dan Sumba Timur dengan

nilai masing-masing Rp49,852,200 dan Rp192,000,000 sehingga nilainya bertambah Rp241,852,200. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	291,852,200
Mutasi tambah:	21,588,625
Pembelian	0
Pengembangan nilai aset tanah	21,588,625
Hibah	0
Mutasi kurang:	0
Revaluasi aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	313,440,825

Pada tahun 2023 terdapat pengembangan nilai aset tanah sebesar Rp21,588,625 yang berasal dari pengurusan dokumen sertifikat kepemilikan tanah di Maumere dan Sumba Timur. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah 31 Desember 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	192,5 m2	Satwas SDKP Flores Timur	50,000,000
2	3000 m2	Satwas SDKP Sumba Timur	209,588,625
3	1716 m2	Wilker PSDKP Maumere	53,852,200
Jumlah			313,440,825

*Peralatan dan
Mesin
Rp29,832,032,976*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29,832,032,976 dan Rp29,574,600,336. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	29,574,600,336
Mutasi tambah:	649,962,085
Pembelian	243,697,640
Pengembangan KDP	0
Perolehan KDP	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
Reklasifikasi masuk	392,529,445
Transfer Masuk	13,735,000
Mutasi kurang:	(392,529,445)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	-
Reklasifikasi keluar	(392,529,445)
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	29,832,032,976
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(25,175,599,832)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4,656,433,144

Mutasi penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp243,697,640 diperoleh dari pembelian peralatan dan mesin selama TA 2023. Sedangkan reklasifikasi masuk dan keluar merupakan koreksi pencatatan barang pada aplikasi SAKTI berupa perubahan Kode Barang pada peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap Nomor : B.1431/PSDKPSta.3/PL.110/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023. Lalu transfer masuk peralatan dan mesin yang berasal dari Pangkalan PSDKP Benoa berupa 1 unit laptop senilai Rp10,835,000 dan dari Seditjen PSDKP berupa 2 unit mesin finger print senilai Rp2,900,000.

*Gedung dan
Bangunan
Rp7,236,950,407*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp7,236,950,407 dan Rp6,328,437,971. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	6,328,437,971
Mutasi tambah:	908,512,436
Transfer masuk	-
Perolehan KDP	77,717,760
Pengembangan KDP	830,794,676
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2023	7,236,950,407
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(716,582,539)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6,520,367,868

Pada tanggal pelaporan, tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp1,942,265,3
92*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,942,265,392 dan Rp1.746.823.363. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1,746,823,363
Mutasi tambah:	195,442,029
Pembelian	195,442,029
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	1,942,265,392
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(938,046,224)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1,004,219,168

Untuk mutasi jalan, irigasi dan jaringan Stasiun PSDKP Kupang pada tanggal pelaporan terdapat mutasi tambah berupa pengadaan listrik darat 33 KVa untuk kapal pengawas Hiu Macan 03 senilai Rp195,442,029 yang sudah selesai pengerjaannya dan kondisinya sudah siap pakai.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk 31 Desember 2023, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp98,390,000*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp98,390,000 dan Rp98,390,000. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan periode pelaporan terdiri dari :

➤ **Perencanaan Pembangunan Rumah Ibadah**

- Nomor Kontrak :SPK.105/PPK-Sta.3/PL.421/II/2020
- Nilai Kontrak : Rp. 54.300.000,-
- Tanggal Kontrak : 21 Februari 2020

- Jangka Waktu : 21 Februari 2020 S/D 21 Maret 2020

Rincian KDP Pembangunan Rumah Ibadah terdiri dari:

1. Pembayaran kontrak perencanaan Rumah Ibadah senilai 43,440,000 (80% dari nilai kontrak karena belum ada pembangunan fisik)

Total KDP Pembangunan Rumah Ibadah per 30 September 2022 senilai **43,440,000**

➤ **Pembangunan Gudang Suku Cadang**

- Nomor Kontrak :SPK.108/PPK-Sta.3/PL.421/II/2020
- Nilai Kontrak : Rp. 64.500.000,-
- Tanggal Kontrak : 21 Februari 2020
- Jangka Waktu : 21 Februari 2020 S/D 21 Maret 2020

Rincian KDP Pembangunan Gudang Suku Cadang terdiri dari:

1. Perencanaan Gudang Suku Cadang senilai 51,600,000 (80% dari nilai kontrak karena belum ada pembangunan fisik)
2. Administrasi Proyek I senilai 3,350,000

Total KDP Pembangunan Gudang Suku Cadang per 31 Desember 2021 senilai **54,950,000**.

Perencanaan Gudang dan Rumah Ibadah PSDKP Kupang sedang dalam proses penghapusan dan prosesnya sudah pada tahap penerbitan SK dari Biro Keuangan KKP.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(26,830,228,595)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(26,830,228,595) dan Rp(24,786,064,985). Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2023**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	29,832,032,976	25,175,599,832	4,656,433,144
2	Gedung dan Bangunan	7,236,950,407	716,582,539	6,520,367,868
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	938,046,224	1,004,219,168
Akumulasi Penyusutan		39,011,248,775	26,830,228,595	12,181,020,180

Aset Tak

Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Kantor Stasiun PSDKP Kupang. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
	0
Jumlah	0

Aset Lain-Lain
Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp921,299,970. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	921,299,970
Mutasi tambah:	-
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	921,299,970
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	921,299,970
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp(776,652,275). Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			0
Software			0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada periode pelaporan, uang muka dari KPPN tersebut merupakan UP yang belum di SP2Dkan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp14,032,807

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14,032,807 dan Rp16,179,436. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang yang ada pada 31 Desember 2023 terdiri dari:

- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp8,661,408;
- Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp4,642,399;
- Tagihan Langganan Air bulan September-Desember 2023 sebesar Rp729,000.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas*Rp13,223,492,007***C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,223,492,007 dan Rp14,078,319,416. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan*PNBP**Rp21,125,383***D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21,125,383 dan Rp13,478,538. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,739,272	13,478,538	50.00%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	352,148	0	
Pendapatan Denda Lainnya	14,033,963	0	#DIV/0!
Jumlah	21,125,383	13,478,538	-56.73%

Pendapatan negara bukan pajak pada periode pembukuan TA 2023 di Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp21,125,383 berupa pendapatan sewa rumah negara kantor Stasiun PSDKP Kupang bulan Januari-Desember 2023 yang dibayarkan dengan memotong gaji pegawai yang menempati rumah tersebut pada saat pengajuan SPM Belanja Gaji pegawai di tiap bulannya dengan total nilai sebesar Rp6,739,272. Selain itu juga terdapat pendapatan denda lainnya yang berasal dari denda sanksi administrasi pelaku usaha perikanan sebesar

Rp14.033.963 yang sudah disetorkan langsung ke negara dengan NTPN 964AF7QLUFMB7T0U dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan listrik darat sebesar Rp352,148 yang sudah disetorkan ke negara dengan NTPN DD31F0N9VRFE1B40. Sedangkan pada tahun 2022 yaitu pemakaian rumah negara tahun 2021 yang dibayarkan pada 22 Februari 2022 melalui Setoran ke Negara dengan NTPN C62E055DEMFCMB3T sebesar Rp6.739.266, dan pendapatan sewa rumah negara kantor Stasiun PSDKP Kupang bulan Januari-Desember 2022 yang dibayarkan dengan memotong gaji pegawai yang menempati rumah tersebut pada saat pengajuan SPM Belanja Gaji pegawai di tiap bulannya dengan total nilai sebesar Rp6,739,272.

Beban

Pegawai

Rp6,122,856,779

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6,122,856,779 dan Rp5,317,450,320. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,158,605,880	1,932,586,480	11.70
Beban Pembulatan Gaji PNS	35,448	30,930	14.61
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	168,384,288	147,644,910	14.05
Beban Tunjangan Anak PNS	55,943,649	49,183,721	13.74
Beban Tunjangan Struktural PNS	11,160,000	12,960,000	(13.89)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	52,920,000	52,870,000	0.09
Beban Tunj. PPh PNS	69,600	52,500	32.57
Beban Tunjangan Beras PNS	148,651,168	135,859,920	9.42
Beban Uang Makan PNS	234,397,000	247,769,000	(5.40)
Beban Tunjangan Umum PNS	94,635,000	86,470,000	9.44
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-	0	#DIV/0!
Beban Gaji Pokok PPPK	110,654,500	0	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,090	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,098,950	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	2,277,180	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	10,350,000	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	7,966,200	0	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	18,785,000	0	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	222,145,000	176,897,000	25.58
Beban Uang Lembur PPPK	18,385,000	0	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,635,880,382	2,475,125,859	6.49
Beban Pegawai (Tunjangan/Khusus Kegiatan) P	163,510,444	0	#DIV/0!
Jumlah	6,122,856,779	5,317,450,320	15.15

*Rincian Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai TA
2023*

URAIAN	Beban	Belanja	Selisih
A	B	C	D
Gaji Pokok PNS	2,158,605,880	2,158,605,880	0
Pembulatan Gaji PNS	35,448	35,448	0
Tunjangan Suami/Istri PNS	168,384,288	168,384,288	0
Tunjangan Anak PNS	55,943,649	55,943,649	0
Tunjangan Struktural PNS	11,160,000	11,160,000	0
Tunjangan Fungsional PNS	52,920,000	52,920,000	0
Tunjangan PPh PNS	69,600	69,600	0
Tunjangan Beras PNS	148,651,168	148,651,168	0
Uang Makan PNS	234,397,000	234,397,000	0
Tunjangan Umum PNS	94,635,000	96,485,000	1,850,000
Gaji Pokok PPPK	110,654,500	110,654,500	0
Pembulatan Gaji PPPK	2,090	2,090	0
Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,098,950	8,098,950	0
Tunjangan Anak PPPK	2,277,180	2,277,180	0
Tunjangan Fungsional PPPK	10,350,000	10,350,000	0
Tunjangan Beras PPPK	7,966,200	7,966,200	0
Uang Makan PPPK	18,785,000	18,785,000	0
Uang Lembur	222,145,000	222,145,000	0
Uang Lembur PPPK	18,385,000	18,385,000	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan)	2,635,880,382	2,635,880,382	0
(Tunjangan/Khusus Kegiatan) PPPK	163,510,444	163,510,444	0
Jumlah	6,122,856,779	6,124,706,779	1,850,000

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat kelebihan bayar pada Tunjangan Umum pegawai yang sedang tugas belajar sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE sebesar Rp1.850.000.

Beban

Persediaan

Rp234,309,153

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp234,309,153 dan Rp216,114,810. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	234,309,153	216,114,810	8.42
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	234,309,153	216,114,810	8.42

Uraian	Nilai
Persediaan Habis Pakai Per 1 Januari 2023 (Saldo Awal 2023)	695,812,272
Realisasi Belanja 521811 31 Desember 2023	203,517,704
Realisasi Belanja 521831 31 Desember 2023	0
Realisasi Belanja 523123 31 Desember 2023	441,276,158
Total Realisasi 31 Desember 2023	644,793,862
Transfer masuk persediaan	0
Total Transfer Masuk	0
Saldo Awal + Total Realisasi + Transfer Masuk	1,340,606,134
Beban Persediaan Konsumsi	234,309,153
Beban Persediaan Suku Cadang	463,463,922
Total Beban	697,773,075
Selisih	642,833,059
Neraca 31 Desember 2023	642,833,059
Selisih	0

Beban Barang dan Jasa
Rp14,190,921,723
 3

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14,190,921,723 dan Rp9,149,735,639. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran (521111)	962,270,941	973,311,451	(1.13)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh (521113)	179,711,134	136,364,157	31.79
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114)	6,430,500	5,690,750	13.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja (521115)	219,576,000	186,396,000	17.80
Beban Bahan (521211)	11,383,479,610	6,846,832,803	66.26
Beban Honor Output Kegiatan (521213)	6,610,000	12,500,000	(47.12)
Beban Barang Non Operasional Lainnya (521219)	931,232,136	565,619,740	64.64
Beban Langganan Listrik (522111)	144,256,987	120,021,832	20.19
Beban Langganan Telepon (522112)	53,813,159	61,981,419	(13.18)
Beban Langganan Air (522113)	60,276,000	50,629,000	19.05
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya (522119)	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa (522141)	43,785,000	53,092,000	(17.53)
Beban Jasa Profesi (522151)	29,800,000	19,600,000	52.04
Beban Jasa Lainnya (522191)	169,680,256	98,073,787	73.01
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192)	0	11,651,000	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin (595112)	0	7,971,700	(100.00)
Jumlah	14,190,921,723	9,149,735,639	55.10
Realisasi Belanja Jasa		Nilai	
Realisasi Belanja Langganan Listrik		142,461,107	
Realisasi Belanja Langganan Telepon		58,457,668	
Realisasi Belanja Langganan Air		59,574,000	
Realisasi Belanja Sewa		43,785,000	
Realisasi Belanja Jasa Profesi		29,800,000	
Realisasi Belanja Jasa Lainnya		169,680,256	
Jumlah Realisasi		503,758,031	
Uraian Beban Jasa		Nilai	
Beban Langganan Listrik		144,256,987	
Beban Langganan Telepon		53,813,159	
Beban Langganan Air		60,276,000	
Beban Sewa		43,785,000	
Beban Jasa Profesi		29,800,000	
Beban Jasa Lainnya		169,680,256	
Jumlah Beban		501,611,402	
Penjelasan Selisih		2,146,629	
Biaya Tagihan Listrik Bulan Desember 2022 lingkup Stasiun PSDKP Kupang		6,865,528.	
Biaya Tagihan Telepon Bulan Desember 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang		9,286,908.	
Biaya Tagihan Air Bulan Desember 2022 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang		27,000.	
Tagihan Listrik Bulan Desember 2023 lingkup Stasiun PSDKP Kupang		-8,661,408.	
Tagihan Telepon Bulan Desember 2023 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang		-4,642,399.	
Tagihan Air Bulan Desember 2023 Lingkup Stasiun PSDKP Kupang		-729,000.	
Jumlah Selisih		2,146,629	

*Beban**Pemeliharaan**Rp3,271,057,013*

3

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3,271,057,013 dan Rp2,443,974,843. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	303,992,685	172,822,980	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,503,600,406	1,824,635,646	37.21
Beban Persediaan Suku Cadang	463,463,922	446,516,217	0.00
Jumlah	3,271,057,013	2,443,974,843	33.84

Beban pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

*Beban**Perjalanan**Dinas**Rp2,264,998,313*

3

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,264,998,313 dan Rp1,434,526,470. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,837,438,026	1,184,016,616	55.19
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	115,700,000	98,700,000	17.22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	216,090,287	131,445,854	64.39
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	95,770,000	20,364,000	370.29
Jumlah	2,264,998,313	1,434,526,470	57.89

Selama TA 2023 terdapat pengembalian atas kelebihan bayar perjalanan dinas pegawai sebesar Rp999. Pengembalian tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023 sesuai pada dokumen NTPN 8F8BB2CPNJCLR0MK

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban
Bantuan Sosial
Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,934,127,063*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,934,127,063 dan Rp2,381,213,487. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,595,660,936	2,052,637,915	-22.26
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	138,507,322	129,422,198	7.02
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	180,672,794	178,229,769	1.37
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	19,286,011	20,923,605	-7.83
Jumlah Penyusutan	1,934,127,063	2,381,213,487	-18.78
			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,934,127,063	2,381,213,487	(19)

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp9,250*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9,250 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	9,250	0	0.00
Jumlah	9,250	0	#DIV/0!

Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada akhir periode pelaporan. Tahun 2023 berasal dari penyisihan dari pengembalian atas kelebihan bayar belanja pegawai TA 2023 sesuai pada NTPN A104E2G4VPICRSJE.

*Surplus/
Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(76,472,685)*

D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(76,472,685) dan Rp4,289,429. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	256	0.00
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(76,472,685)	4,289,173	0.00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(76,472,685)	4,289,429	0

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

➤ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan akumulasi dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp48,888,999 (berupa hasil lelang aset yang sudah rusak berat) dan Beban Pelepasan Aset

Non Lancar sebesar Rp125,361,684 (Nilai aset yang dilelang dikurangi dengan nilai penyusutannya). Pelepasan aset tersebut merupakan lelang aset sesuai pada surat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S-62/MK.6/KNL.1405/2023 Tanggal 24 Mei 2023.

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp14,078,319,416

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14,078,319,416 dan Rp12,735,312,976.

Defisit LO

Rp(28,073,626,596

)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(28,073,626,596) dan Rp(20,925,247,602). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

<p><i>Penyesuaian Nilai Aset Rp0</i></p>	<p>E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset</p> <p>Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.</p>
<p><i>Koreksi Nilai Persediaan Rp0</i></p>	<p>E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan</p> <p>Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.</p>
<p><i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0</i></p>	<p>E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap</p> <p>Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.</p>
<p><i>Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp(120,906,308)</i></p>	<p>E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi</p> <p>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(120,906,308) dan Rp(4,235,760). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2023 tersebut merupakan koreksi pencatatan Kode Barang Peralatan dan Mesin sesuai pada Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Modul Aset Tetap Nomor : B.1431/PSDKPSta.3/PL.110/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023. Sedangkan pada 2022, nilai koreksi tersebut merupakan dampak atas koreksi atas kesalahan pencatatan aset. Pada saat input transaksi pembelian</p>

baterai drone di modul komitmen dicatat sebagai aset dengan NUP baru sehingga dilakukan koreksi pencatatan di modul aset dengan mencatat transaksi tersebut sebagai pengembangan nilai aset langsung pada NUP yang sudah ada yaitu NUP kamera udara.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Tahun 2023*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(120,906,308)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	(120,906,308)

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi
Antar Entitas
Rp27,339,705,49
5*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27,339,705,495 dan Rp22,272,489,802. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
TA 2023 dan 2022*

Transaksi Antar Entitas	TA 2023	TA 2022
Diterima dari Entitas Lain	(70,014,382)	(21,113,681)
Ditagihkan ke Entitas Lain	27,404,401,127	21,958,533,483
Transfer Masuk	5,318,750	93,217,800
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	241,852,200
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	27,339,705,495	22,272,489,802

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 2023, DDEL sebesar Rp68,329,564 berasal dari:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan hasil lelang peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam operasional pemerintahan 1 Paket Bongkaran Hasil Perbaikan Kapal Hiu Macan 03 (terdiri dari 1 paket bongkaran replating KP Hiu Macan 03 dan 2 unit genset KP Hiu Macan 03) senilai **Rp40,000,000** dengan Nomor Risalah 1306/37/2023 tanggal 30 Agustus 2023, dan 1 Paket Peralatan dan Mesin (Motor Tempel Speedboat, Perahu Karet, Alat Pengolah Air Laut) dan 1 unit Sepeda Motor senilai **Rp8,888,999** dengan Nomor Risalah Lelang: 221/69/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu sewa Rumah Negara milik Stasiun PSDKP Kupang sebesar Rp6,739,272 yang dibayar perbulan pada SPM Gaji (memotong Gaji pegawai yang

bersangkutan). Pengenaan sewa rumdin ini berdasarkan pada Surat Keputusan KPA Stasiun PSDKP Kupang Nomor: KEP.012/KPA-PSDKPSta.3/I/2023 Tentang Penetapan Pengguna/Penanggung Jawab Rumah Negara pada Stasiun PSDKP Kupang;

- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang berasal dari denda atas keterlambatan pekerjaan pengadaan listrik darat senilai Rp352,148 dengan NTPN DD31F0N9VRFE1B40 dan tanggal bayar 24 Agustus 2023;
- Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp14,033,963 yang berasal dari pendapatan fungsional (sanksi administrasi pada pelaku usaha yang tidak tertib) dan dibayarkan dengan penyetoran langsung ke negara dengan NTPN 964AF7QLUFMB7T0U pada tanggal 15 April 2023.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Terdapat transfer masuk pada TA 2023 sebesar Rp5,318,750 yang terdiri dari 2 transaksi yaitu:

- Transfer Masuk dari Pangkalan PSDKP Benoa sesuai dengan BAST BMN Nomor: B.3408/PSDKPLan.4/PL.750/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023. Adapun barang yang ditransfer masuk berupa Notebook Asus 1 Unit dengan nilai perolehan Rp10,835,000 dan nilai penyusutan Rp(8,126,250) sehingga nilai akhir menjadi Rp2,708,750;

- Transfer Masuk dari Sesditjen PSDKP KPP sesuai dengan BAST BMN Nomor : B.4952/PSDKP.1/PL.450/IX/2023 tanggal 31 Juli 2023. Adapun barang yang ditransfer masuk berupa Finger Print Aplikasi Data TPKP (2 unit) dengan total nilai perolehan Rp2,900,000 dan nilai penyusutan Rp290,000 sehingga nilai akhir menjadi Rp2,610,000.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tahun 2023 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp13,223,492,007

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13,223,492,007 dan Rp14,078,319,416.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting yang mengakibatkan *force majeure* bagi UPT Stasiun PSDKP Kupang yang terjadi setelah tanggal Neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. SK Pengelola Anggaran Keuangan pada Stasiun PSDKP Kupang adalah sebagai berikut:
 - Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi. sebagai Kepala Stasiun PSDKP Kupang sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/KU.611/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga puluh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.234/KPA-PSDKPSta.3/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, yaitu:
 - PPK : Christian A. Nauk, S.St.Pi.
Adia Candra, S.AP., M.PA.
 - PPSPM : Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi.
 - Pengangkatan Bendahara Pengeluaran yaitu Ochrans E. Ataupah, S.Pi. dan Bendahara Penerimaan yaitu Ulfah Lainun Bokings,

S.Pi. sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.003/KPA-PSDKPSta.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Kupang.

- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ditetapkan dengan Keputusan KPA Nomor KEP.004/KPA-PSDKPSta.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari 2 orang yaitu:
 - Satwas SDKP Flores Timur : Simon Suban Masan, S.Pi.
 - Satwas SDKP Sumba Timur : Dionesia Desyana Tokan, S.Pi.

2. Terdapat revisi DIPA anggaran sampai periode TA 2023 sebanyak 19 kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Revisi pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022. Revisi ini untuk menyediakan anggaran cadangan atau Automatic Adjustment dengan cara memblokir Sebagian anggaran yang dimiliki UPT;
- b. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2023. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- c. Revisi ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023. Revisi ini untuk membuka blokir anggaran pembangunan kantor Wilker PSDKP Maumere;
- d. Revisi keempat dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. Revisi ini merupakan pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- e. Revisi kelima dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;

- f. Revisi keenam dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- g. Revisi ketujuh dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK dan pemutakhiran halaman III DIPA;
- h. Revisi kedelapan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- i. Revisi kesembilan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- j. Revisi kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- k. Revisi kesebelas dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023. Revisi ini adalah revisi Kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran untuk pemenuhan kekurangan anggaran biaya sertifikat tanah dan menggeser anggaran yang diblokir AA dari UPT ke Sesdit;
- l. Revisi kedua belas dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023. Revisi ini adalah revisi Dit PA untuk pemenuhan kekurangan anggaran Belanja Pegawai (PPPK);
- m. Revisi ketiga belas dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023. Revisi ini untuk pemutakhiran atas revisi POK;
- n. Revisi keempat belas dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Revisi ini adalah revisi Kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran yang diblokir kode 2 (anggaran sewa kendaraan yang diblokir) ke pusat;
- o. Revisi kelima belas dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan DJA berupa pergeseran anggaran yang diblokir ABT (kode 9) ke pusat;
- p. Revisi keenam belas dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan DJA berupa

- pergeseran anggaran yang diblokir kode 2 (anggaran pokmaswas) ke pusat;
- q. Revisi ketujuh belas dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023. Revisi ini merupakan kewenangan kanwil berupa pergeseran antar jenis belanja untuk mengakomodir kekurangan anggaran pada kegiatan kantor;
 - r. Revisi kedelapan belas dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2023. Revisi ini adalah revisi kewenangan Dit PA berupa pergeseran anggaran dari Kupang ke Satker lain;
 - s. Revisi kesembilan belas dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023. Revisi ini adalah kewenangan kanwil berupa pergeseran belanja pegawai untuk penyelesaian pagu minus.
3. Terdapat utang pada pihak ketiga di tahun 2023. Adapun utang pihak ketiga tersebut yaitu:
- Tagihan Langganan Listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp8,661,408;
 - Tagihan Langganan Telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp4,642,399;
 - Tagihan Langganan Air bulan September-Desember 2023 sebesar Rp729,000.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 10b/LHP/XVII/05/2022, tanggal 27 Mei 2021 terkait Perencanaan, Penatusahaan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Tetap dan Aset Lainnya Tidak Sesuai Ketentuan, bersama ini kami sampaikan progress temuan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat 2 temuan dan semua sudah ditindaklanjuti. Adapun rincian temuan sebagai berikut:
- Aset dalam kondisi rusak berat. Sudah ditindaklanjuti dengan penghapusan aset rusak berat. Dari total aset rusak berat sebesar Rp921.299.970, aset yang telah selesai dihapus sebesar

Rp806.645.500 (87,56%), dan Rp114.654.470 (12,44%) sedang dalam proses penerbitan Risalah Lelang oleh KPKNL Kupang;

- Aset Tanah di Flores Timur yang belum memiliki bukti kepemilikan. Sudah ditindaklanjuti dengan pengurusan sertifikat tanah dan sertifikat tersebut sudah terbit;
 - Aset Gedung dan Bangunan yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah (IMB/PBG) sebanyak 4 Bangunan yaitu 2 Bangunan Rumah Negara di Kupang, 1 Bangunan Mess Operator, dan 1 Bangunan Kantor Wilker PSDKP Atapupu. Stasiun PSDKP Kupang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengurusan penerbitan dokumen IMB/PBG bangunan tersebut.
5. Sampai Periode TA 2023, sudah dilakukan beberapa reuiu dan pemantauan oleh APIP/Inspektorat II. Berikut adalah rincian reuiu dan pemantauan tersebut:
- Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor: R.73/ITJ.2/HP.380/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Hasil Reuiu Dokumen Persiapan Penunjukan Langsung Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas pada Stasiun PSDKP Kupang yang dilakukan pada tanggal 20 s.d. 24 Maret 2023 dan sudah ditindaklanjuti sesuai BA Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 2445.09.07/ITJ/PL.420/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023;
 - Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor: R.104/ITJ.2/HP.380/IV/2023 tanggal 14 April 2023 Perihal Hasil Reuiu atas Dokumen Usulan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Stasiun PSDKP Kupang yang dilakukan pada tanggal 10 s.d 14 April 2023 dan sudah ditindaklanjuti sesuai BA Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 2470.09.07/ITJ/PL.420/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023;
 - Surat dari Inspektorat Jenderal Nomor:

R.115/ITJ.2/HP.380/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 Perihal Hasil Reviu Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Maumere TA 2023 pada Stasiun PSDKP Kupang pada tanggal 2 s.d. 8 Mei 2023 dan sudah ditindaklanjuti sesuai BA Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor 2488.09.07/ITJ/PL.420/VII/2023 tanggal 9 Juli 2023;

6. Penjelasan Mengenai Penetapan Status Penggunaan BMN

No	Uraian	Nilai Aset	Sudah PSP	Belum PSP
1	Tanah	313,440,825	313,440,825	-
2	Peralatan dan Mesin	29,832,032,976	29,750,036,886	81,996,090
3	Gedung dan Bangunan	7,236,950,407	6,328,437,971	908,512,436
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,942,265,392	1,942,265,392	-
Jumlah		39,324,689,600	38,334,181,074	990,508,526

Progres Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP) Tahunan per 31 Desember 2023 dari total aset senilai Rp39.324.689.600, yang sudah ditetapkan PSP senilai Rp38.334.181.074. Sedangkan dari sisa yang belum PSP, sebagian sudah diajukan PSP sebesar Rp81.996.090 sesuai pada Surat Permohonan PSP BMN Nomor: B.102/PSDKPSta.3/PL.710/I/2024 tanggal 10 Januari 2024. Dan sisanya sebesar Rp908.512.436 merupakan transaksi pada bulan Desember yang belum dilakukan pengajuan PSP berupa Bangunan Kantor Wilker PSDKP Maumere.

7. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Stasiun PSDKP Kupang

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp98.390.000**. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan periode pelaporan terdiri dari :

➤ **Perencanaan Pembangunan Rumah Ibadah**

- Nomor Kontrak :SPK.105/PPK-Sta.3/PL.421/II/2020
- Nilai Kontrak : Rp. 54.300.000,-
- Tanggal Kontrak : 21 Februari 2020

- Jangka Waktu : 21 Februari 2020 S/D 21 Maret 2020

Rincian KDP Pembangunan Rumah Ibadah terdiri dari:

- ✓ Pembayaran kontrak perencanaan Rumah Ibadah senilai 43,440,000 (80% dari nilai kontrak karena belum ada pembangunan fisik).
- ✓ Total KDP Pembangunan Rumah Ibadah per 30 September 2023 senilai **43,440,000**;

➤ **Pembangunan Gudang Suku Cadang**

- Nomor Kontrak :SPK.108/PPK-Sta.3/PL.421/II/2020
- Nilai Kontrak : Rp. 64.500.000,-
- Tanggal Kontrak : 21 Februari 2020
- Jangka Waktu : 21 Februari 2020 S/D 21 Maret 2020

Rincian KDP Pembangunan Gudang Suku Cadang terdiri dari:

- ✓ Perencanaan Gudang Suku Cadang senilai 51,600,000 (80% dari nilai kontrak karena belum ada pembangunan fisik);
- ✓ Administrasi Proyek I senilai 3,350,000;
- ✓ Total KDP Pembangunan Gudang Suku Cadang 31 Desember 2023 senilai **54,950,000**.

Perencanaan Gudang dan Rumah Ibadah PSDKP Kupang sedang dalam proses penghapusan dan prosesnya sudah pada tahap penerbitan SK dari Biro Keuangan KKP.

8. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sisa bahan bakar minyak solar dan minyak pelumas Kapal Hiu Macan 03 Nomor 208/HMC.03.3.2/Sta.3/PL.450/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 sisa Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 24.300 liter.
9. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor T.1518/PSDKP.1/HP.520/IV/2024 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Belanja Pegawai Tugas Belajar tanggal 5 April 2024, bahwa terdapat temuan BPK RI terkait ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai atas pembayaran

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar. Pada Stasiun PSDKP Kupang terdapat kelebihan bayar pada Tunjangan Umum pegawai yang sedang tugas belajar sehingga perlu dilakukan pengembalian atas kelebihan bayar tersebut. Pengembalian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 dengan NTPN A104E2G4VPICRSJE sebesar Rp1.850.000.